

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerataan pendapatan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi (Amri Khairul, 2017). Pembangunan adalah suatu proses perencanaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Dalam teorinya Simon Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat, namun seiring berjalannya pembangunan ketimpangan pendapatan akan mulai menurun. Penurunan ini terjadi karena peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, Investasi serta pergeseran tenaga kerja ke upah yang lebih tinggi. Idealnya, pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan serta pemerataan (Dwi et al., 2021).

Salah satu tolak ukur untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan adalah distribusi pendapatan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat ketimpangan (Wibowo, 2016). Ketimpangan pendapatan merupakan kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat, di mana ada sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, sementara yang lainnya memiliki penghasilan rendah (Oksamulya & Anis, 2020). Ketidakmerataan pendapatan di Indonesia dapat diukur

menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah Gini Rasio sebagai indeks ketimpangan pendapatan (Putri et al., 2015).

Ketimpangan pendapatan adalah masalah di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini dapat digambarkan sebagai perbedaan pendapatan antara warga negara berpendapatan tinggi dan rendah. Kelangsungan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, dipengaruhi oleh dampak ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, stabilitas sosial, dan solidaritas. Jika sangat ekstrim, ketimpangan juga dapat dianggap tidak adil (Kusuma et al., 2019).

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering menghadapi dua masalah besar: kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Ketimpangan pendapatan bukan hanya masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang; negara-negara maju juga tidak terlepas dari masalah ini (Damanik et al., 2018).

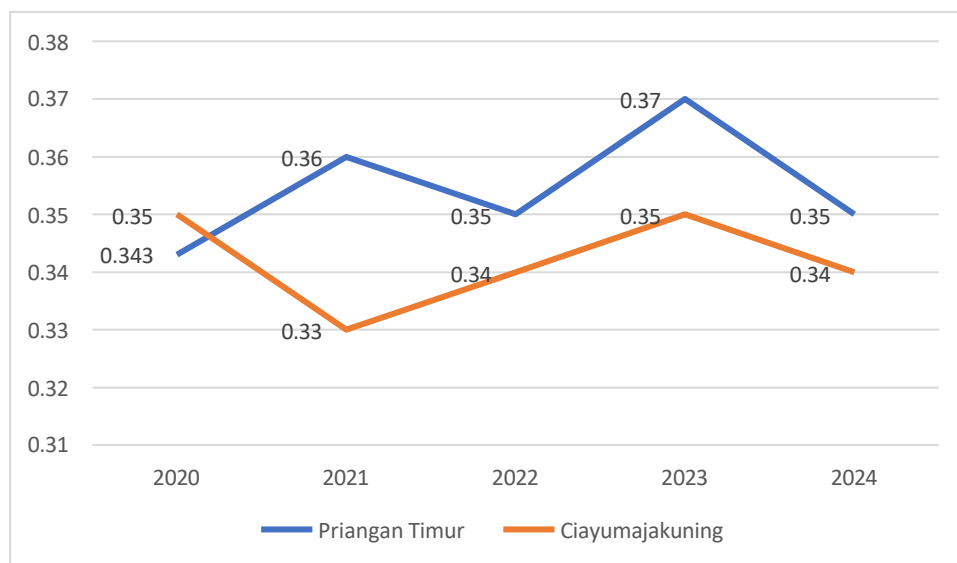
Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui angka Gini Ratio nasional agar berada dalam kisaran 0,36 pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2020). Target tersebut sejalan dengan agenda pembangunan global yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) berfokus untuk mengurangi ketimpangan di dalam suatu negara maupun antar negara.

Namun fakta di lapangan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia juga menunjukkan variasi antarwilayah. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 12,84% pada tahun 2024, masih menghadapi persoalan distribusi pendapatan yang belum merata. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (2024), Gini Ratio provinsi ini pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,428, menunjukkan ketimpangan yang relatif tinggi dibandingkan tingkat gini secara nasional yang hanya sebesar 0,38. Perbedaan kondisi sosial ekonomi antar kabupaten/kota menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya disparitas tersebut, salah satunya yaitu di wilayah priangan timur.

Wilayah Priangan Timur, yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar, merupakan kawasan dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Jawa Barat bagian selatan. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menjadi penopang utama perekonomian daerah. Namun, data menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di kawasan ini (BPS Jawa Barat, 2024). Berikut grafik yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di wilayah priangan timur tahun 2019-2024

Wilayah Priangan Timur dan Ciayumajakuning merupakan dua kawasan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kesamaan karakteristik ekonomi dan sosial. Kedua wilayah ini sama-sama didominasi oleh sektor pertanian, industri kecil dan menengah, serta aktivitas perdagangan sebagai penopang utama perekonomian

daerah. Struktur kesempatan kerja yang relatif serupa, tingkat pendidikan yang bervariasi, serta konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu menyebabkan distribusi pendapatan di kedua kawasan ini belum sepenuhnya merata. Kesamaan karakteristik tersebut tercermin pada tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat diukur melalui Gini Ratio



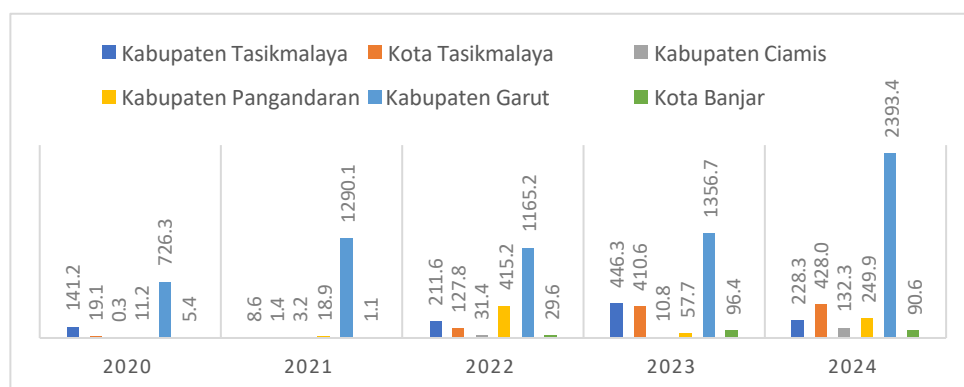
Sumber; BPS (data diolah)

Gambar 1.1
Perbandingan Tingkat Gini Ratio
Priangan Timur dan Ciayumajakuning

Berdasarkan data Gini Ratio tahun 2020–2024 yang ditampilkan pada grafik, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah Priangan Timur cenderung lebih tinggi dan berfluktuasi dibandingkan dengan wilayah Ciayumajakuning. Hal ini dapat terjadi karena tingkat investasi yang belum merata antar kabupaten/kota, kualitas pendidikan yang masih timpang terutama di daerah perifer, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dalam sektor bernilai tambah tinggi faktor ini selaras dengan temuan (M. Sari, 2021) yang menjelaskan bahwa variasi investasi dan kualitas SDM menjadi determinan ketimpangan

wilayah di Jawa Barat. Selain itu, angka harapan hidup yang meningkat tidak serta-merta menurunkan ketimpangan apabila tidak diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja (Puteri, 2020) Kondisi ini menunjukkan masih belum terciptanya pemerataan pendapatan di wilayah-wilayah priangan timur, sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam teori kuznet, ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kebijakan. Salah satu faktor penting yang banyak dikaji adalah investasi. Investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas (Julihanza & Khoirudin, 2023). Dalam teori ekonomi, investasi diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui penciptaan tenaga kerja. Ketika semakin banyak lapangan kerja maka distribusi pendapatan akan semakin merata dan memperkecil angka ketimpangan pendapatan



Sumber :BPS (data dioalah)

Gambar 1.2
Tingkat Investasi di Priangan Timur Tahun 2018-2024
(Miliar Rupiah)

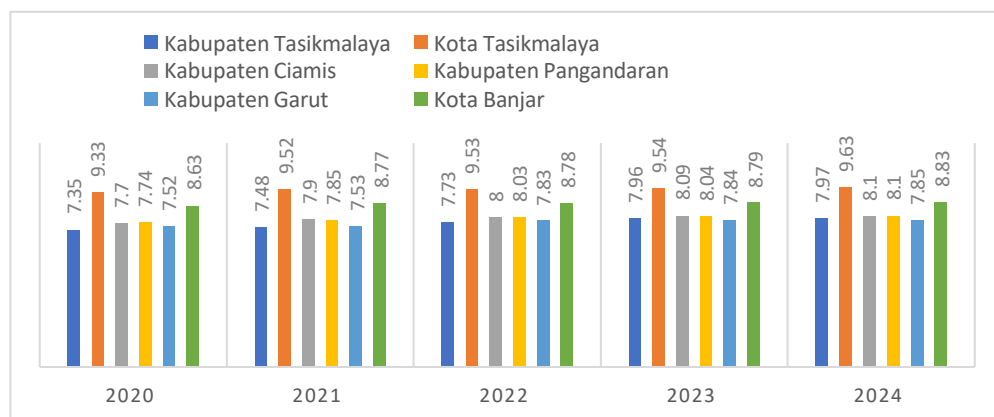
Dari gambar diatas dapat dilihat nilai investasi di kabupaten/kota yang ada di Priangan Timur tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa investasi tidak merata

disetiap daerahnya namun setiap tahun nilainya cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 kabupaten Tasikmalaya dan Garut menjadi wilayah dengan nilai investasi tertinggi masing-masing sebesar 228,3 miliar dan 2393,4 miliar, sedangkan kota Banjar menjadi wilayah dengan nilai investasi terendah yaitu 90,6 miliar. Perbedaan realisasi investasi di pringan timur ini disebabkan oleh variasi kualitas kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta struktur ekonomi daerah. Daerah dengan birokrasi perizinan yang efisien, infrastruktur memadai, dan tenaga kerja yang lebih terampil cenderung lebih menarik bagi investor, sementara daerah dengan kendala regulasi, keterbatasan akses transportasi, atau kualitas SDM yang rendah biasanya menerima aliran investasi yang lebih kecil (Yuliadi, 2020). Selain itu, faktor ukuran pasar, ketersediaan sumber daya alam, serta stabilitas sosial-politik turut memengaruhi daya tarik investasi antar wilayah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan (Wijayanti et al., 2023) dan (Janah, 2022) menyatakan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun penelitian sering kali menemukan hasil yang berbeda pada tempat, waktu serta sasaran penelitian yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Akhmad & Barabasi, 2025) dan (Wijayanti, Novia Nur Arif, 2023) menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Faktor lain yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan diyakini sebagai alat mobilitas sosial yang dapat membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan

berpendapatan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pendapatan yang layak dan stabil (Suryahadi et al., 2020). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya disparitas akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Priangan Timur, yang berdampak pada ketimpangan dalam kesempatan ekonomi.



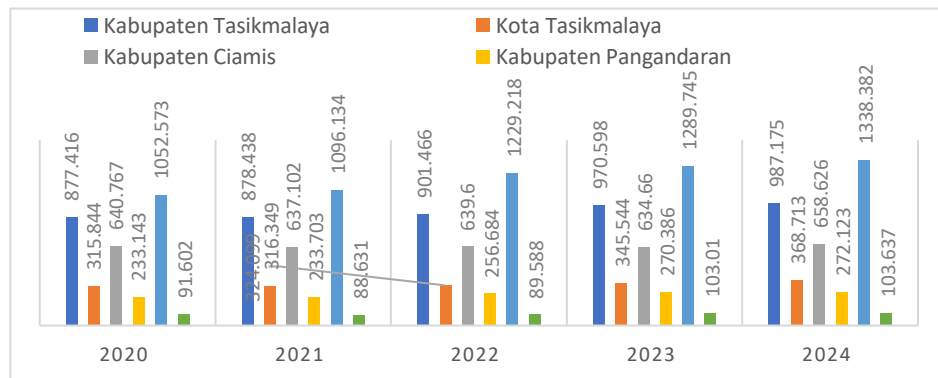
Sumber :BPS (data diolah)

Gambar 1.3
Rata-Rata Lama Sekolah di Priangan Timur
Tahun 2018-2024 (Tahun)

Dilihat dari gambar diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan di wilayah priangan timur secara keseluruhan mengalami kenaikan setiap tahunnya,namun proporsinya masih belum merata.Kota Tasikmalaya dan kota Banjar menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan tertinggi di Priangan Timur sedangkan Kabupaten Garut serta Tasikmalaya menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan paling rendah.Pada tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan paling rendah dengan angka 7,35 tahun dan kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan paling tinggi yaitu 9,33 tahun,sementara pada tahun 2024 Kabupaten Garut menjadi wilayah dengan tingkat pendidikan paling rendah yaitu hanya 7,85 tahun dan tingkat pendidikan

yang paling tinggi adalah Kota Tasikmalaya yaitu 9,63 tahun, hal ini disebabkan oleh akses kependidikan yang belum merata di setiap wilayah dimana wilayah perkotaan sering kali memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Melisa, Maulia, S.T, 2023) (Wahyuni, 2016) dan (Nesha Rizky Ashari et al., 2024) menunjukkan bahwa tingkat rata-rata sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Akan tetapi didalam penelitian (Fithrian et al., 2015) serta (Ramadhansyah Rayyan Effendy et al., 2025) menyatakan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

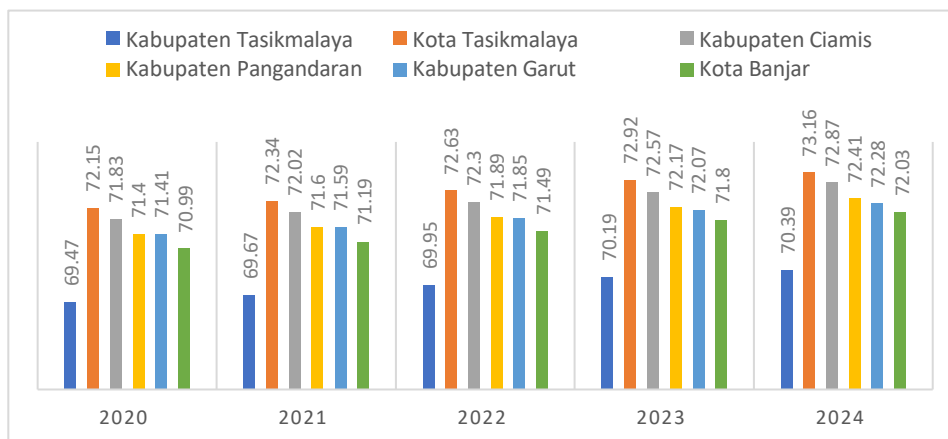
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah jumlah penduduk yang bekerja, menurut (Silalahi et al., 2024), dimana penduduk yang bekerja memberikan kontribusi dalam memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji dalam hal ini secara tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Sehingga secara teori semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja akan membuat pemerataan dalam pendapatan sehingga memperkecil tingkat ketimpangan pendapatan, dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di wilayah priangan timur dalam ribu rupiah tahun 2020-2024.



Sumber ; BPS (data diolah)

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Priangan Timur Tahun 2020-2024 (Ribuan orang)

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 jumlah penduduk yang bekerja di wilayah priangan timur terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di wilayah priangan timur diserap oleh pasar kerja, sehingga dapat meningkatkan pemertaan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Effendy & Djohan, 2022) (Mangiri & Sasabone, 2023) dan (Elverbinta Br et al., 2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, akan tetapi dalam penelitian (Endang Nurma, 2025) dan (Silalahi et al., 2024) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain jumlah penduduk yang bekerja, tingkat kesehatan juga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan output (Laila, Dai, & Canon, 2024), ketika output meningkat maka akan membuat pendapatan meningkat sehingga terjadi distribusi pendapatan yang merata.



Sumber : BPS (data dioalah)

Gambar 1.5
Angka Harapan Hidup di Priangan Timur Tahun 2020-2024 (Tahun)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa angka harapan hidup yang diukur dengan angka harapan hidup di wilayah priangan Timur menunjukkan hasil yang belum merata setiap daerahnya meskipun semua daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun,hal ini disebabkan oleh infarstruktur kesehatan yang belum merata dimana wilayah perkotaan cenderung memiliki akses kesehatan yang lebih baik disbanding wilayah pedesaan .Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi wilayah dengan angka harapan hidup paling rendah di wilayah prianga timur dari tahun 2020-2024 sedangkan kabupaten ciamis menjadi wilayah dengan angka harapan hidup tertinggi di wilayah priangan timur dalam periode 2020-2024.Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (S. Dai et al., 2023) dan (Hasanah & Economics, 2024) menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan,sementara penelitian yang dilakukan oleh (Pambudi, 2021) menyatakan bahwa angka harapan hidup menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, alasan penulis melakukan penelitian di Priangan Timur, karena di wilayah Priangan Timur ini terjadi suatu permasalahan yaitu, nilai gini ratio yang masih naik turun di setiap tahunnya serta secara rata-rata masih lebih tinggi dibanding wilayah Ciayumajakuning, padahal jika dilihat dari tingkat investasi di wilayah priangan timur yang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2024 nilai investasi di priangan timur mencapai 3,522 triliun rupiah, selain itu tingkat pendidikan yang terus membaik di semua wilayah priangan timur kemudian jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ketahun yang terus meningkat, serta tingkat kesehatan yang diukur menggunakan angka harapan hidup yang semakin membaik dari tahun ketahun. Dari fenomena tersebut didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu seharusnya tingkat ketimpangan pendapatan di Priangan Timur semakin rendah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Priangan Timur Tahun 2018-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk yang bekerja dan Angka Harapan Hidup secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan di wilayah Priangan Timur tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk yang bekerja dan Angka Harapan Hidup secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan di wilayah Priangan Timur tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angka Harapan Hidup secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan di wilayah Priangan Timur tahun 2018-2024?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk yang bekerja dan Angka Harapan Hidup secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan di wilayah Priangan Timur tahun 2018-2024?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang ekonomi dan pembangunan manusia. Dengan menganalisis pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Harapan Hidup terhadap Ketimpangan Pendapatan di Priangan Timur, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai determinasi faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam melihat hubungan antara variabel-variabel ekonomi, sosial, dan kualitas pembangunan manusia di tingkat regional..

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh Investasi, tingkat pendidikan, jumlah penduduk bekerja dan angka harapan hidup terhadap ketimpangan pendapatan sehingga dapat dijadikan masukan serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai ketimpangan pendapatan atau gini ratio, terutama di wilayah Priangan Timur.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan atau gini ratio. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan manfaat serta sumber data untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengetahui pengaruh Investasi, tingkat pendidikan, jumlah penduduk bekerja dan angka harapan hidup terhadap ketimpangan pendapatan di Priangan Timur tahun 2018-2024.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil penulis pada penelitian ini adalah wilayah priangan timur yang terdiri dari kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, kota Banjar dan kabupaten Pangandaran. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode 2018-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

[illegible]